

Sastra dan Kritik Sosial-Keagamaan: Sejarah Syair Lautan Jilbab Emha Ainun Najib

Literatur and Socio-Religious Criticism: The History of Emha Ainun Najib's Poem Lautan Jilbab

Muhammad Novan Leany¹

Pascasarjana Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
surel: m.novan1997@gmail.com

Abstract

The long history of religious conversion in Indonesia dates to the 1980s when the political rivalry between the ideologies of Pancasila and Islamism entered lifestyles such as the beard, turban, pants, and hijab. In 1979, the political side of the authoritarian and repressive New Order regime considered the emergence of Iran's Islamic revolution as a threat to the Pancasila ideology that violated human rights. Thus, dehumanization, intolerance, and discrimination against Muslims in Indonesia, especially women, are threatened socially, economically, and opportunities to obtain education. The poem Lautan Jilbab was born as a medium of criticism that was considered safe to answer the challenges of social and religious problems of its time. By reviewing existing studies, this article pays special attention to the formulation of socio-religious criticism of the poem Lautan Jilbab historically critical with the background of the problem: (a). How is the form of social-religious criticism in the poem Lautan Jilbab, (b). Why the poem Lautan Jilbab was written and became a criticism of the socio-religious phenomena of its time, (c). How is the implication of Lautan Jilbab poem towards social religious phenomenon from time to time.

Keywords: Literatur, Social-Religious Criticism, and Lautan Jilbab Poem

Abstrak

Sejarah panjang konversi agama di Indonesia terjadi pada tahun 1980-an ketika persaingan politik ideologi Pancasila dan Islamisme masuk dalam gaya hidup seperti jenggot, sorban, celana cingkrang, hingga hijab. Pada tahun 1979, sisi politik rezim Orde Baru yang otoriter dan represif menganggap kemunculan revolusi Islam Iran sebagai ancaman bagi ideologi Pancasila yang melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, dehumanisasi, intoleransi, dan deskriminalisasi terhadap umat Islam di Indonesia khususnya perempuan terancam secara sosial, ekonomi, dan kesempatan dalam memperoleh pendidikan. Puisi Lautan Jilbab lahir sebagai media kritik yang dianggap aman untuk menjawab tantangan permasalahan sosial dan keagamaan pada masanya. Dengan menelaah kajian-kajian yang telah ada, artikel ini memberikan perhatian khusus pada perumusan kritik sosial-keagamaan terhadap puisi Lautan Jilbab secara historis kritis dengan latar belakang masalah: (a). Bagaimana bentuk kritik sosial keagamaan dalam puisi Lautan Jilbab, (b). Mengapa puisi Lautan Jilbab ditulis dan menjadi kritik terhadap fenomena sosial keagamaan pada masanya, (c). Bagaimana implikasi puisi Lautan Jilbab terhadap fenomena sosial keagamaan dari masa ke masa.

Kata kunci: Sastra, Kritik Sosial-Keagamaan, dan Syair Lautan Jilbab

PENDAHULUAN

Pandangan masyarakat umum terhadap sastra sekadar dikaitkan dengan cerita romantisme atau gombalan belaka. Padahal, sastra terutama puisi atau syair sejatinya, merupakan karya seni teks yang di dalamnya terdapat unsur perenungan, hakikat, bahkan menjadi media kritik (Naquib Al-Attas 2001). Di Indonesia terjadi kontroversi sejarah pada tahun 1980-an terutama dalam persaingan politik antara pro dan kontra kelompok Islam.

Problematika begitu kompleks, terutama saat Orde Baru sedang kuat-kuatnya mengintai persoalan politik dan ekonomi negara. Mengingat kembali ungkapan Imam Khoemaeni pada tahun 1979 yaitu kemunculan revolusi Iran dengan perdebatan diskriminasi jilbab di Indonesia yang melanggar hak asasi manusia (Argenti 2018). Islam politik atau Islamisme di Indonesia begitu kuat terutama maraknya radikalisme Islam secara fisik seperti janggut, surban, celana cingkrang, hingga jilbab (Subarkah 2019). Pada masanya diskriminasi persoalan hak asasi manusia terutama berbaju politik Islam tidak hanya dirasakan di Indonesia tetapi juga di Perancis dan Inggris (Najib 2017). Dapat dikatakan, fenomena sosial dan keagamaan diperbincangkan hangat, baik segi politik nasional maupun internasional. Hal inilah yang menjadi inspirasi Emha Ainun Najib menulis sebuah syair *Lautan Jilbab* sebagai bentuk kegelisahan dan kritik terhadap problematika tersebut.

Sejauh ini sudah banyak artikel yang mendiskusikan tentang syair *Lautan Jilbab*. Pertama, artikel membahas perjalanan dakwah Emha Ainun Nadjib dengan konteks harmoni masyarakat dalam kerangka struktur sufistik (Faiz 2019). Kedua, artikel mendiskusikan syair *Lautan Jilbab* dalam konteks pendidikan Islam (Muniroh 2013). Ketiga, artikel mendiskusikan pesan-pesan dakwah syair *Lautan Jilbab* dalam bingkai hermeneutika (Khulafa 2021). Keempat, artikel sekaligus tesis yang mendiskusikan nilai-nilai tawasawuf dalam syair *Lautan Jilbab* Emha Ainun Nadjib (Hanafi 2019). Akan tetapi, konteks penelitian-penelitian tersebut tidak membahas secara historis dan kritik sosial keagamaan dalam syair *Lautan Jilbab* dari masa ke masa. Sehingga, tidak subjektif dan terpetakan dengan baik. Padahal, dengan melakukan penelitian subjektif dan memetakannya, justifikasi persoalan syair *Lautan Jilbab* dalam pemakaiannya, tidak disalahartikan. Oleh karenanya, artikel ini bisa dikatakan sebuah respons dari penelitian sebelumnya yang dikembangkan dari kajian literatur secara historis, kritis, dan deskriptif dalam bingkai kritik sosial dan keagamaan.

Ada tiga pokok permasalahan yang dibahas: (a) Bagaimana bentuk kritik sosial keagamaan dalam syair *Lautan Jilbab*? (b) Mengapa syair *Lautan Jilbab* ditulis dan menjadi kritik terhadap fenomena sosial keagamaan pada masanya? (c) Bagaimana implikasi syair *Lautan Jilbab* terhadap fenomena sosial-keagamaan pada masanya? Ketiga pokok permasalahan tersebut merupakan pembahasan yang sangat penting dari analisis syair *Lautan Jilbab* karya Emha Ainun Najib. Oleh karena itu, studi ini diharapkan menjadi kontribusi pada diskusi teoritis tentang persoalan sastra dan kritik sosial-keagamaan. Temuan-temuan dalam artikel ini setidaknya menjadi salah satu formulasi syair *Lautan Jilbab* dengan kritik sosial-keagamaan dalam kajian hitoris juga kritis.

Istilah Islamphobia muncul semenjak neologisme pada tahun 1970, sebuah istilah yang menjadi populer di kalangan aktivis antirasis Eropa pada tahun 1980 hingga 1990-an. Peristiwa 11 September 2001 tentu merupakan momen penting bagi penerapannya di Eropa dan Amerika Serikat. Istilah ini pun muncul karena meningkatnya kebutuhan-kebutuhan untuk mengatasi keberadaan migran muslim di negara bagian utara dan kesenjangan antara barat dan timur. Fakta terbukti pada paruh kedua abad ke-29, yaitu sejumlah besar penduduk negara-negara muslim bermigrasi ke Eropa dan Amerika Utara, yang menandakan adanya pergeseran-pergeseran ekonomi yang memerlukan sejumlah besar cadangan tenaga kerja baru. Terlebih, konflik Timur Tengah yang terkait dengan warisan zionisme dan pendudukan Palestina.

Islamphobia sendiri meningkat di seluruh Euro-Amerika dan negara-negara satelitnya. Pnina Werbner, seorang antropolog berpendapat bahwa Islamphobia adalah jenis

rasisme tertentu. Rasisme, yang didasari oleh ketakutan deprivasi sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh hubungan antara Islam dan Barat yang memiliki visi pembentukan kapitalisme Barat (Rana 2007) Jika ditarik ke Indonesia, ialah intoleransi beragama antara muslim dan orang Kristen di Poso, Sulawesi Tengah dan di Maluku antara tahun 1988 dan 2001. Intoleransi di Poso itu dimulai dengan tawuran pemuda Kristen dan muslim yang mabuk. Sedangkan di Maluku dipicu perkelahian seorang supit bus beragama Kristen dan penumpang beragama Islam. Problem-problem ini pun mengeluarkan pendapat, bahwa berkelahi, menggunakan senjata, saling bunuh sampai sekarang, mereka (Kristen) sangat membenci umat muslim di Indonesia, karena umat Islam adalah mayoritas (Shukri 2019).

Karya-karya yang dihasilkan oleh Emha Ainun Najib tidak jauh dari persoalan fenomena sosial dan keagamaan yang ada di Indonesia (Nadjib 1991; Nadjib, 2016; Nadjib, 2012; Nadjib, 2015). Akan tetapi, syair *Lautan Jilbab* mempunyai keunikan tersendiri dari sisi historis kontroversi yang pernah mencoba menangkai ideologi Islamophobia pada masanya. Kelahiran syair atau puisi ini pun tidak lepas dari dampak fenomenologis yang dirasakan oleh penyairnya. Syair tersebut beranggapan bahwa jilbab sesungguhnya bukan sekadar selembar kain, justru melambangkan sebuah gerakan. *Para malaikat Allah tak memiliki bahasa dan budaya// tapi dari galaksi mereka seakan-akan terdengar suara “ini tak main-main! Ini lebih dari sekadar kebangkitan sepotong kain”* (Nadjib 1989) kata “Jilbab” sendiri dijadikan sebagai metafor, yang bergerak lincah sebagai bentuk identitas. Emha Ainun Najib menyampaikan bahwa tidak ada ketakutan dan keraguan muslimah di Indonesia untuk memilih mengenakan jilbab dan beraktivitas. Jilbab digambarkan sebagai bentuk makna manusiawi, ketuhanan juga kemanusiaan, yaitu saling menghargai dan menghormati sesama masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini berjenis studi kepustakaan atau *library research* dengan metode kualitatif analitik (Creswell and Creswell, 2014). Penelitian ini memperoleh data-data literatur yang terkait riset kepustakaan, yang tentu dianalisis secara hermeneutis filosofis (Murtiningsih, 2021). Data primernya adalah jurnal dan buku yang mengkaji persoalan kritik sosial keagamaan selama sepuluh tahun terakhir, yakni dari Desember 2011 hingga Desember 2022. Pembatasan waktu didasarkan pertimbangan atas kefokusannya analisis dalam kritik sosial keagamaan dalam syair *Lautan Jilbab* yang cukup tampak dalam kurun waktu tersebut. Maka, kebutuhan studi atas literatur sosial keagamaan sendiri dapat memungkinkan untuk diperoleh.

Studi ini sangat memfokuskan perhatiannya pada topik-topik kritik sosial keagamaan yang berbalut sastra dan budaya juga konteks historis di Indonesia. Ini dikarenakan data persoalan kritik sosial keagamaan yang dibutuhkan dalam studi ini hanya tersedia pada bahan literatur jurnal, buku, website yang terus berkembang dari studi-studi sebelumnya. Media dan *website* dipilih sebagai sumber primer karena memiliki sebuah fungsi dan fitur yang menyediakan data-data topik berita persoalan sosial keagamaan dari masa ke masa. Meskipun begitu, penelusuran tersebut terbilang cukup representatif karena terdapat bermacam-macam fakta informasi data terkini. Adapun data sekundernya adalah sejumlah kumpulan literatur yang relevan dikumpulkan, lalu dilakukan deskripsi data, dan yang terakhir adalah tahapan interpretasi konteks data yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Emha Ainun Nadjib: Kehidupan, Karya, dan Sejarah Syair Lautan Jilbab

Karya syair *Lautan Jilbab* lahir dari torehan pena Emha Ainun Nadjib, seorang tokoh budayawan asal Jombang yang lahir pada 27 Mei 1953. Emha merupakan anak keempat dari

lima belas bersaudara dari pasangan Muhammad Abdul Latif dan Chalimah, yaitu tokoh yang juga sangat berpengaruh di lingkungannya. Banyak warga yang berkunjung dan mengadukan permasalahan hidupnya baik faktor ekonomi maupun agama. Sifat Emha tidak berbeda dari sifat kedua orang tuanya, mempunyai nyali peduli dan selalu mendengarkan keluh kesah kesusahan rakyat kecil. Kedua orang tuanya tidak kalah kritis terhadap ketidakadilan di lingkungannya (Adiatma n.d.). Selain itu, Emha Ainun Nadjib juga merupakan penggerak dari grup musik dakwah yaitu Kiai Kanjeng dan komunitas Jamaah Ma'iyah yang tersebar luas di berbagai kota khususnya di Indonesia, acara ini memiliki karakteristik yang kuat, yaitu melayani undangan kalangan yang berkontribusi memecahkan masalah-masalah sosial seperti pola komunikasi cara berpikir, penyatuan umat, juga tentang obor Ilahi (Yunus dan Luthfi, 2019). Banyak budayawan sebelumnya yang tertarik dengan cara berpikir Emha Ainun Nadjib, salah satunya buku yang berjudul *Sepotong Dunia Emha* dari tesis yang berjudul *Emha Ainun Nadjib dalam Arena Sastra dan Arena Sosial* mahasiswa UAD Yogyakarta (S Nugraha, 2018).

Selama menjadi penyair, Emha hidup di jalanan Malioboro, Yogyakarta selama lima tahun, ia pula yang membentuk teman-teman penyair Malioboro yang pada kalanya bernama Persada Studi Klub (PSK). Emha sangat terikat dengan Umbu Landu Paranggi, yang digelar sebagai presiden Malioboro, bersama kawan-kawan lainnya seperti Linus Suryadi, Korrie Layyun Rampan yang berperan aktif dalam terjadinya transformasi order baru ke orde reformasi terutama dalam penyuaran kritik (Anon 2024). Sayangnya, pergerakan komunitas ini sudah vakum, semenjak meninggalnya Umbu Landu Paranggi beberapa tahun silam. Akan tetapi, bersama Kiai Kanjeng sejak tahun ke-6 berdirinya Emha lebih aktif mengunjungi lebih dari 22 provinsi, 476 kabupaten, 1.430 kecamatan, dan 1865 desa di seluruh nusantara (Yunus and Luthfi 2019).

Lautan Jilbab adalah sebuah karya yang tidak terlahir dari kekosongan budaya. Pada tanggal 17 Maret 1982 Mendikbud, Daoed Joesef, menandatangani surat keputusan 052/C/Kep/D.82 dalam aturan pemakaian Seragam Sekolah Nasional. Surat tersebut melarang adanya pemakaian jilbab di sekolah-sekolah formal. Indonesia begitu geger oleh otoritas Soeharto kala itu, mencurigai macam-macam gerakan politik Islam yang dianggap akan mencoreng nilai-nilai Pancasila. Sebagai penyair, Emha Ainun Nadjib gelisah dengan kondisi tersebut, di sanalah titik awal syair *Lautan Jilbab* lahir. Karya itu kemudian dideklarasikan pada *Forum Ramadhan on Campus* dan sebagian besar panitianya merupakan Jamaah Shalahuddin UGM dan dilaksanakan pada Mei 1987 (K. Pratama 2021). Setelah tahun berikutnya, syair *Lautan Jilbab* tidak hanya dibacakan di panggung, tetapi dipentaskan berupa teater dengan enam ribu penonton. Pentas tersebut benar-benar menyadarkan psikologis penonton dengan fenomena-fenomena di lingkungannya. Pertunjukan *Lautan Jilbab* sendiri, benar-benar mengisi kolom media cetak pada masanya, terutama persoalan penonton di Stadion Wilis, Madiun, yang mencapai lebih dari 35 ribu penonton (K. Pratama 2021).

Koran *Jawa Pos* Edisi 23 Juli 1991 dengan tulisan *Christine Hakim di Lautan Jilbab: Karya Cak Nun Digelar di Go Skate*, mengatakan bahwa pertunjukan drama kolosal tersebut, melibatkan 70 orang aktor dan kru, yang terdiri atas 40 orang Surabaya dan 30 dari Yogyakarta (K. Pratama 2021). Pada masanya, *Lautan Jilbab* merupakan karya sastra puisi yang memberikan bentuk-bentuk psikologis kepada para pembaca yang mengalami problematika fenomena lingkungan pada saat itu. Emha Ainun Nadjib beranggapan karya tersebut hanya sebatas persoalan estetika, tidak mengekang siapapun untuk menginterpretasikan karya tersebut dalam medium apapun (K. Pratama 2021).

Syair dan pertunjukan *Lautan Jilbab* merupakan sebuah refleksi dari keadaan pelarangan berjilbab rezim Orde Baru, kasus Kedung Ombo dan Tragedi Monitor 27.

Mengingat kembali di Majalah Matra edisi tahun 1992 tentang perkataan Emha yang menjelaskan persoalan pertunjukan *Lautan Jilbab* sebagai bentuk ketidakadilan. "Kita ini rakyat. Kita ini bos di negeri, semua pejabat bawahan kita karena kita yang menggaji mereka, orang-orang di DPR itu wakil-wakil kita, jadi kita ini adalah ketua mereka", ungkap Emha (Adiatma n.d.). Pada akhir dekade 1980-an, hingga awal 1990. Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia mencari dukungan dari kalangan Islam untuk mengubah peraturan tentang pemakaian jilbab oleh perempuan. Kemudian, lahirlah 30 SK Mendikbud Nomor 100/C/Kep/D/1991 yang disahkan 16 Februari 1991. Hal ini, merupakan tolok ukur fenomena *Lautan Jilbab* yang diciptakan oleh Emha Ainun Nadjib. Hingga saat ini jilbab diperbolehkan secara umum di Indonesia (Ricklefs 2008).

3.2 Analisis Kritik Sosial-Keagamaan dalam Buku *Lautan Jilbab*

Nilai-nilai yang ditekankan dalam syair *Lautan Jilbab* sangat sering terkait dengan hubungan relasional antara nilai-nilai manusia dan Tuhan. Nilai sendiri, dimaknai sebagai perjalanan manusia menapak jejak pada hakikat kehidupannya. Begitu terkait dengan esainya yang berjudul "Mereka Mencari Rumus Tuhan". Tulisan tersebut, tidak jarang menyampaikan proses religiusitas manusia yang tidak bisa dinilai secara "hitam dan putih" (Hadi 2017). Dalam hal ini, Emha menyampaikan bahwa persoalan keyakinan religiusitas seseorang tidak dapat diukur dalam hitam dan putih karena manusia mempunyai aspek-aspek penumpuan spiritualnya masing-masing. Syair *Lautan Jilbab* sangat menekankan kesadaran pluralistik dengan konsep wacana humanisme. Emha, menyampaikan kesadaran alam dan kesemestaan yang berdimensi moral lewat syairnya. Secara umum, banyak yang mengenalnya sebagai *Humanisme Emha*, saat keterkaitan pesan-pesan moral dan makna dalam syair tersebut seperti spiritual, mental, dan intelektual merupakan ketercerahan moral. Buku syair *Lautan Jilbab* sendiri, terdapat pola pikir Emha yang memaparkan manusia dengan kulit moral dan toleransi secara estetik puitika.

Kebebasan dan sebuah kesetaraan agama sangat berhadapan dengan sebuah ketakutan akan ekstrimisme dan keinginan untuk mengeluarkan agama dari ruang lingkup negara, sekolah atau tempat kerja. Adapaun faktor kesamaan antara lainnya merupakan aturan-aturan yang dibingkai dalam istilah-istilah netral, atau perdebatan seluruhnya yang begitu berkenaan dengan Islam, sehingga legislatif, publik, bahkan yudisial sangat terfokus kepada pakaian yang berkenaan dengan wanita dan gadis muslimah (Alattas 2021).

Sedemikian pentingkah gerakan jilbab di negeri itu?

*O/ sama pentingnya dengan kekecutan hati
semua kaum yang tersingkir, sama pentingnya
dengan keputusan kaum gelandangan, sama
pentingnya dengan kematian jiwa orang-orang
malang yang dijadikan alas kaki sejarah// (Nadjib
1989)*

Kritik dalam syair *Lautan Jilbab* sendiri, lebih tampak dalam persoalan toleransi dan diskriminasi muslimah Indonesia. *Sedemikian pentingkah gerakan jilbab di negeri itu? O/ Sama pentingnya dengan kekecutan hati semua kaum yang tersingkir...* Syair tersebut begitu membuka pikiran, apakah pelarangan jilbab itu bisa merusak iman suatu bangsa? Pada tingkatan tertentu, syair tersebut tampak menyebarkan nilai-nilai keislaman di antara fenerasi muda Islam dan para pelajar muslim. Sehingga, dapat dikatakan pergerakannya merupakan suatu bentuk resistensi terhadap kebijakan Pemerintahan Orde Baru yang dirasakan begitu represif terhadap umat Islam.

Syair *Lautan Jilbab*, merupakan jalan tanding suatu bentuk perlawanan dari pers yang bersekutu kepada Orde Baru. Syair *Lautan Jilbab* sendiri, menjadikan karya sastra sebagai bentuk nyata awalnya, yaitu merupakan pengungkapan potret masalah sosial, karya sastra merupakan saksi atas hal yang telah terjadi di lingkungannya (Pratiwi, Safitri, dan Farika 2019). Pada masanya, Lembaga Pers merupakan suatu jalan dari kebencian dan kemarahan masyarakat terhadap kesewenangan kekuasaan untuk menghindari kerusakan atau dikatakan sebagai wahana katarsis sosial. Praktik politik di berbagai macam negeri, termasuk Indonesia, tidak semua pers berfitrah sebagai kontrol kekuasaan, cukup banyak pers justru dibentuk karena bagian dari kekuasaan itu sendiri. Indonesia memiliki sejumlah pers yang terbentuk dari pengelolaan, orientasi redaksional, hingga sumber manusianya berasal dari negara, misalkan dahulu dikenal *Harian Berita Yuga 1996*, *Harian Angkatan Bersenjata*, dan *Suara Karya* (Akbar 1997). Format politik pada masa Orde Baru sendiri, negara sangat cenderung personalisasi, sangat kiat dan begitu dominatif, sangat berhadapan dengan unsur-unsur masyarakat, sehingga kritik sosial melalui medium pers sangat sulit dikemukakan.

3.3 Syair *Lautan Jilbab* dan Fenomena Sosial Keagamaan di Masanya

3.3.1 Konteks Sosial Keagamaan

Fenomena jilbab dalam perkembangannya membawa pesan beragam, bukan sekadar definisi dan istilah. Akan tetapi, pemberian makna dan penerapannya dalam pandangan masyarakat yang mengusung simbol-simbol sosial keagamaan dan pemberian identitas sosial (Yulikhah 2017). Maraknya pemakaian jilbab di Indonesia, banyak dikupas para pakar dari berbagai macam faktor. Pertama, faktor ekonomi, mahalnya salon-salon kecantikan pada masanya serta tuntutan gerak cepat dan praktis, membuat perempuan mencari jalan pintas dengan mengenakan jilbab. Kedua, maraknya berjilbab merupakan sikap pertentangan terhadap dunia barat yang sering ditemukannya standar ganda untuk melecehkan umat islam dan agamanya. Ketiga, pemakaian jilbab merupakan simbol pandangan politik, yang di mana pada mulanya kewajibab kelompok-kelompok islam politik untuk membagi wanita yang muslimah dan non muslimah (Shihab 2012).

Pelarangan berjilbab pada tahun 1980 masyarakat islam Indonesia, memang sangat tidak terlepas dari tindakan represif seperti penekanan, pelarangan bahkan kekerasan. Perlakuan ini, berlaku hingga pasca Order Baru, mulai dari sejumlah peraturan daerah yang mengeluarkan peraturan untuk mengelola busana muslimah. Diskriminasi persoalan keislaman juga otoriter rezim Soeharto (Kamsi 2013). Pada zaman itu, masyarakat yang berbusana muslim masih digolongkan sebagai dua aspek, yaitu religious dan pengaruh politik islam. Faktor tersebut disinyalir para aktivis Islam dan seniman mencari strategi untuk menyuarakan ketidakadilan rakyat di Indonesia, salah satunya seperti pertunjukan teater terutama mulai menjamurnya penulis-penulis lekra. Persoalan paling menyedihkan pada zaman orba ialah, keluarnya statemen pemerintahan yang berbunyi “*Bagi yang bersikukuh dengan keyakinan, akan dikeluarkan dari sekolah*”. Adapun, berita-berita diskriminasi keyakinan lewat berbusana makin marah, seperti rumor *Jilbab Beracun*, di Pasar Rawu, Banten, seorang perempuan dihajar massa atas tuduhan memasukan racun di makanan (2021)

Para pemakai jilbab di Indonesia, benar-benar tidak lepas dari kecurigaan dari aparat keamanan dan lembaga pendidikan, terutama pada tahun 1982 di SMAN 1 Jember, seorang siswi yang memakai jilbab dikeluarkan dari sekolah dengan sebab dicurigai sebagai anggota Jamaah Imran. Bahkan, kasus tersebut sampai berurusan dengan Markas Korim D824 Jember (Jo 2021). Isu-isu diskriminasi tersebut membuat beberapa kampus perguruan tinggi di Indonesia menimbulkan persoalan pro dan kontra tentang penggunaan jilbab. Organisasi-organisasi kerohanian kemudian menjamur hingga ke Pulau Jawa, sepertinya Jamaah

Shalahuddin di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan semangat Islam ideologis, dengan berani mementaskan pertunjukkan “Syair Lautan Jilbab” Karya Emha Ainun Nadjib tersebut. Seiring menyebarnya para alumni LMD ke kampus perguruan tinggi di seluruh Indonesia, demam jilbab pun makin menjamur dan melanda para mahasiswi Islam sehingga gempita revolusi Islam di Iran pada 1979 yang mendunia begitu menambah persoalan gairah Islam kalangan anak-anak muda wanita di kampus (Arief and Husin 2019).

3.3.2 Konteks Sosio-Kultural

Kebijakan Pemerintah Orde Baru perihal pelarangan jilbab, tidak lain bertujuan untuk menyeragamkan pakaian siswi saat sekolah. Akan tetapi, pelarangan tersebut dinilai klise, justru menimbulkan reaksi antara siswi dan orang tua yang bersangkutan. Dampak pelarangan jilbab sendiri, sangat kuat berkaitan dengan nuansa politik Order Baru sebagai hubungan buruk antara pemerintah dengan khalayak umat Islam (Arief and Husin 2019). Walaupun hubungan keduanya sempat membaik, tetap saja kekerasan represif aparat kepada umat Islam tentang diskriminasi busana begitu mencekam, persoalan tersebut sangat sesuai dengan isi dari beberapa bait Syair *Lautan Jilbab* yang berbunyi,

*//Adakah jilbab itu semacam tindakan politik/
semacam perwujudan agama/
atau pola perubahan kebudayaan? (Nadjib 1989)*

Dalam syair ini, Emha Ainun Nadjib sedikit menyinggung dan mempertanyakan persoalan diskriminasi busana muslim terutama jilbab di Indonesia yang dianggap sebagai hama dengan menyematkan tanda tanya di akhir syairnya. Ketika masa Orde Baru begitu berkuasa, kalangan Islam Politik selain mengalami marginalisasi politik juga mendapatkan represifitas. Mengingat kembali tragedi ketertindasan pada tahun 1980, saat semangat pemakaian jilbab Revolusi Iran 1979 begitu berpengaruh sehingga membuat berita-berita revolusi menjadi berita panas media nasional dengan persoalan kerumunan demonstrasi-demonstrasi berjilbab, yang disinyalir sebagai simbol-simbol perlawanan terhadap hedonis budaya barat yang menjadi kultur insprasi remaja Islam Indonesia masa itu (Argenti and Rifai 2014). Keinginan para remaja Islam tidak berbanding lurus dengan keputusan represif dari Pemerintah Orde Baru, sehingga pemakaian jilbab di sekolah-sekolah negeri semakin dilarang. Pada masa itu, tidak ada pilihan lain bagi kaum lautan jilbab selain untuk pindah ke sekolah-sekolah Islam seperti Muhammadiyah.

Satu kasus juga berlangsung di SMAN 68 Jakarta pada November 1988, saat para siswi mulai marak menggunakan jilbab. Beberapa siswi mendapat tekanan dari pihak sekolah. Adapun, siswi tersebut diminta untuk memilih, antara keluar dari kelas, guru tidak mengajar, atau melepas jilbabnya. Selang beberapa tahun tekanan terus meningkat, sehingga membuat orang tua siswi meminta bantuan hukum LBH untuk melakukan musyawaran. Akan tetapi, sama sekali tidak membuahkan hasil (Arief and Husin 2019).

Banyak yang menyangkal fenomena jilbab di Indonesia merupakan permasalahan keagamaan. Selain itu, banyak lembaga pendidikan Islam seperti pesantren yang dikelola Departemen Agama, Muhammadiyah, dan NU mengharuskan santri untuk mengenakan jilbab guna menutup aurat. Inilah problematika yang nampak di Indonesia pada masanya, yaitu pertarungan politik yang berbaju agama.

3.3.3 Konteks Politis

Peradaban lautan jilbab di Indonesia, tidak lepas dari wacana dan sebuah perdebatan konsep-konsep kebangsaan yang membawa islamisme sebagai dasar negara. Berdasarkan catatan sejarah tentang bangkitnya rasa nasionalisme di Indonesia berawal dari pergerakan

melawan kolonial Belanda untuk mencapai kemerdekaan. Tidak lupa, perjuangan Islam pun mempunyai peran yang krusial dan penting untuk menentukan eksistensi Indonesia ke depan. Dapat disimpulkan, bahwa dari pandangan historis Indonesia pada masanya sempat mengalami perdebatan ideologis Islam dan non-Islam (Kamsi 2013).

Mengingat kembali pada awal kejayaan penyebaran Islam, jilbab bagi umat Islam merupakan bentuk kesalehan, kesucian, atau sebuah tanda tingkat keimanan seseorang. Namun, pada masa kini, pandangan kaum muslim laki-laki justru sekadar konstruksi perempuan, seperti jilbab merupakan produk budaya, identitas, eksistensi, penutup diri, dan *fashion* belaka (Suhendra 2016). Pada masanya jilbab berbasis politik Islam, justru memasuki arena hedonis sebagai pengaruh eksternal, persaingan ideologi, industri, ekonomi, bahkan mencakup aspek sosial budaya (Husyein 2017) Dalam persoalan ini, jilbab seolah mengalami konteks pemaknaan yang berbeda, terdapat dinamika dan konstelasi terhadap peradaban itu sendiri.

//Dunia entah macam apa/ menyergap kami

Sejarah entah ditangan siapa/ menjaring kami

Kekuasaan entah dari napsu apa/ menyerimpung kami (Nadjib 1989)

Penggalan bait syair *Lautan Jilbab* di atas, menggambarkan riuh perpolitikan di Indonesia *//Kekuasaan entah dari napsu apa/ menyerimpung kami//* benturan antara ideologis Islam dan ideologis Pancasila mengalami pro dan kontra kaum elit politik di Indonesia. Tentu, dalam konteks ini, umat Islam termarginalisasi. Persoalan ini dapat dilihat pada masa kini, ketika MUI memfatwa haram cara atau model-model jilbab yang semakin berkembang, sehingga hal-hal seperti ini berbenturan pula dengan paham demokrasi berekspresi. Keadaan politik Islam pada masa Orde Baru tidak banyak mengalami perubahan. Pemerintahan Orde Baru selalu menganggap umat Islam sebagai ancaman pemerintah, sebab berseberangan dengan keinginan pemerintah dalam menerapkan asas-asas tunggal Pancasila (Nuraeni dan Gumilar 2021).

Masyarakat mengalami politik identitas, terutama umat Islam. Politik identitas mengarah kepada kaum-kaum yang terdiskriminasi dalam kondisi politik, sosial, dan kultural. Aksi-aksi perasaan kecewa dan tidak puas juga berlangsung dalam kegiatan berinteraksi sosial. Identitas diartikan oleh umat muslim yang menerima gagasan modernisme Islam sebagai upaya pemurnian doktrin keagamaan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan merujuk pada khazanah kebudayaan Barat (Husyein, 2017). Sejak 1998, Indonesia mengalami transisi dari otoritarianisme menuju dua dasawarsa demokrasi, yang secara umum disebut sebagai *Islamic Resurgence*, di mana agama-agama secara tidak disadari mulai hadir di ranah publik (Azra, 2018). Dalam Majalah *Sabana*, kegelisahan Emha terkait politik identitas menjadi pusat perhatian elit politik. Emha hadir tanpa organisasi atau kelompok yang mewakilinya. Syair *Lautan Jilbab* lahir sebagai kritik keras terhadap rezim Orde Baru (Riyanti, 2017).

3.4 Implikasi Syair Lautan Jilbab Terhadap Fenomena Sosial-Keagamaan di Masanya

3.4.1 Kritik Isu Toleransi

Rezim sentralistis Orde Baru cenderung merepresi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kurikulum pendidikan yang mulai diterapkan pada tahun 1968. Kurikulum tersebut tidak terlepas dari pengaruh politik otoriter Soeharto. Pendidikan agama, misalnya, dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban politik. Pada masa itu, isu toleransi beragama mulai mencuat, terutama terkait kebangkitan kelompok-kelompok Islam berhaluan keras (Ardaneswari, 2021).

Prinsip toleransi sebenarnya telah lama tertanam di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang mengajarkan makna keberagaman ras, adat, dan budaya. Namun, iklim toleransi yang telah menjadi tradisi mulai memudar akibat maraknya kekerasan dan tindakan represif atas nama agama. Contoh kecil dari fenomena ini, selain kontroversi terkait jilbab, adalah kerusuhan Tanjung Balai dan Tolikara. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan semakin pudarnya toleransi dan kerukunan beragama di Indonesia (Madung, 2017).

*//Adakah jilbab itu semacam tindakan politik/
semacam perwujudan agama/ atau pola
perubahan kebudayaan? (Nadjib 1989)*

Penggalan bait syair *Lautan Jilbab* berjudul “Maka Inilah Jilbab” memberikan pemaknaan tentang perlunya menerima umat Muslim yang mengenakan jilbab tanpa prasangka. Jilbab, yang sejatinya hanya penutup aurat, seharusnya tidak dilihat sebagai tindakan politik, kriminal, atau upaya benturan peradaban. Kelunturan agama sebenarnya dapat berasal dari kelompok itu sendiri. Misalnya, fanatisme dan radikalisme sering muncul karena keyakinan bahwa kebenaran agama yang dianut adalah mutlak. Keyakinan ini terkadang mendorong penganutnya menjadi fanatik ekstrem, hingga menyalahkan agama lain berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Dalam kasus diskriminasi jilbab, bahkan umat Muslim yang mengenakan jilbab sering kali cenderung menyalahkan atau merendahkan keimanan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Fanatisme dan radikalisme ini tidak hanya terjadi antaragama, tetapi lebih sering muncul dalam internal satu agama itu sendiri (Jamrah, 2015).

Aturan-aturan persoalan penggunaan jilbab, dengan bertujuan untuk menonjolkan agama tertentu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (Iqbal 2021). Dalam moderasi beragama, pemaksaan penggunaan jilbab atau atribut khas agama tertentu dapat mengilangkan nilai-nilai paham moderat dan karakter pada agama itu sendiri.

*//Aku tak memerlukan keyakinan atau
ketidakkeyakinan// Yang aku persoalkan adalah
kenapa kau memilih mempengaruhi orang lain
dan tidak membiarkan saja mereka memproses
pilihannya sendiri// (Nadjib 1989)*

Penggalan bait syair *Lautan Jilbab* berjudul “Hal Wanita Telanjang” mengangkat isu krisis toleransi yang semakin nyata di Indonesia. Syair ini menyoroti pentingnya perilaku toleran sebagai syarat utama untuk menciptakan kehidupan yang saling menghormati dan harmonis. Tanpa toleransi, perbedaan suku, ras, dan agama berpotensi memicu konflik dan ketidaksepahaman yang dapat merusak kerukunan masyarakat (Ghazali, 2016).

3.4.2 Kritik Terhadap Marjinalisasi Perempuan

Sejarah dikotomi antara laki-laki dan perempuan telah terjadi sekian lama. Perempuan selalu menjadi objek mengimplementasikan dirinya ke arah publik. Dikotomi sendiri tercipta dan berjalan dari oposisi biner yang tidak pernah satu jalan. Sementara, jika relasi bersifat relasi asosiatif, masalah yang akan timbul akan cukup minim. Akan tetapi, fakta di lapangan justru mengalami ketimpangan-ketimpangan dari relasi tersebut. Dalam hal ini, perempuan justru terpinggirkan dengan berbagai macam jenis bentuk, seperti penindasan, ketimpangan dan peminggiran perempuan terjadi sejak dulu, terutama pelanggaran siswi berjilbab di sekolah (Sofyan 2019). Konteks ketidakadilan tersebut sangat

cenderung dengan dalil-dalil agama. Dalil di dalam agama quran dan hadis sangat sering digunakan dalam pembenaran tindakan yang benar-benar memarginalisasikan kaum perempuan, yang di mana konteks perempuan di sini harus patuh kepada kaum laki-laki.

Pada tahun 1980, marginalisasi perempuan di Indonesia meningkat, terutama dengan adanya larangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah umum. Perempuan yang mengenakan jilbab juga ditolak di berbagai instansi pekerjaan, seperti pemerintahan dan perusahaan (Najitama, 2014). Namun, kondisi ini berubah pada tahun 1990 ketika pemerintah mencabut larangan tersebut melalui surat keputusan yang mengizinkan penggunaan jilbab bagi pelajar. Sayangnya, pemakaian jilbab di Indonesia masih dangkal, sering kali hanya dianggap sebagai identitas Muslim, padahal pemahaman ini kurang tepat. Jilbab lebih dari sekadar simbol identitas; ia juga berfungsi sebagai atribut yang dapat membantu mencegah interaksi yang memicu hasrat seksual. Akibat persoalan politik identitas ini, banyak perempuan kehilangan kesempatan untuk bersekolah dan bekerja.

*//Ya/ Mursyid/Kenapa agama diatur oleh negara/
dan bukan sebaliknya?
//Sang Mursyid menjawab, "Karena negara berhati
kekuasaan dan bermata senapan//Sedangkan
agama berhati cinta dan bermata keselamatan// (Nadjib 1989)*

Penggalan bait syair tersebut dari salah satu syair Lautan Jilbab yang berjudul "Komedi Kebingungan" gambaran negara yang begitu represif terhadap para perempuan terutama yang menggunakan jilbab begitu kentara. Dalam hal ini, Emha menjadikannya sebuah guyonan atau kritik secara sarkas, yang di mana syair "Komedi Kebingungan" ini mempertanyakan agama secara kritis, pertanyaan tersebut sangat nampak pada kata "Kenapa". Menghabarnya pula, gerakan-gerakan perempuan muslim Orde Baru sendiri, tidak terlalu diperbincangkan pada dunia publik, seolah-olah mati dalam sejarah Orde Baru di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh Pemerintah yang bersifat otoriter praktis (Pohan 2020). Justru, gerakan perempuan sangat menjamur pada masa pemerintah Soeharto, yaitu masa reformasi.

3.4.3 Kritik Terhadap Represif Rezim Penguasa

Banyak yang berpandangan bahwa buku syair Lautan Jilbab sendiri mengkritik persoalan busana muslim dan pelarangan jilbab di Indonesia. Padahal, ada syair tersebut yang berjudul "Bersemangat Laut, Berjiwa Telaga" yang justru mengkritik pergerakan-pergerakan perempuan yang disembunyikan juga dibungkam.

*//Beribu jilbab
Lahir dari ibu gelap sejarah
Dari Mutiara yang disembunyikan
Dari suara yang dibungkam (Nadjib 1989)*

Pasca kemerdekaan dan penyerahan Jepang kepada sekutu, kata "merdeka" seolah tidak layak disematkan bagi perempuan di Indonesia. Perempuan sering kali tersingkirkan oleh sistem pembangunan yang didasarkan pada logika akumulasi kapital (Wulansari, n.d.). Hingga kini, masih banyak tindakan represif terhadap perempuan oleh pemerintah yang belum terungkap sepenuhnya.

Perempuan masa kini, meskipun tidak berada dalam sistem patriarki yang seketat masa penjajahan, masih terpinggirkan oleh relasi kuasa yang dikendalikan oleh kolonial-

kolonial pribumi. Kondisi ini menciptakan ketidakberdayaan bagi perempuan dan gerakan mereka, meskipun laki-laki kelas pekerja pun juga merasakannya. Sistem kapitalisme yang dominan telah menciptakan praktik patriarki baru yang membebani perempuan, seringkali dengan reproduksi sosial yang ganda. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan lonjakan kekerasan seksual, dengan banyak perempuan menjadi korban pemerkosaan. Pasca 20 tahun reformasi, ancaman trauma kekerasan seksual terus mengintai perempuan di Indonesia (Wulansari, n.d.). Secara umum, ini dapat dipandang sebagai depresi ekonomi, di mana perempuan, terutama dari kelas pekerja, menghadapi ancaman represif yang nyata. Budaya patriarki masih mendalam di Indonesia, menjadikan perempuan sebagai kelompok yang dianggap lemah dan minoritas, sehingga mereka semakin terpinggirkan.

Pola berpikir patriarki, yang paling dirasakan pada masa Orde Baru, terlihat jelas dalam pengendalian yang diberlakukan terhadap perempuan. Salah satu contoh pengendalian tersebut adalah penggunaan alat kontrasepsi seperti KB susuk, suntik, IUD, dan pil KB, yang dapat merusak tubuh perempuan. Dalam pandangan ini, rahim perempuan dianalogikan seperti lahan subur yang harus dihentikan produksinya demi kebahagiaan negara (Susilo & Kodir, 2016).

*//Tak ada perlindungan bagi hati nurani kami yang
dipanggang di atas tungku api congkak
kekuasaan (Nadjib 1989)*

Dalam penggalan syair “Maka Inilah Jilbab” dimaknai bahwa kaum perempuan sempat merasakan ketidakperlindungan dirinya oleh aparat negara pemerintah Orde Baru. Syair Lautan Jilbab benar-benar menangkap isu-isu yang krusial di Indonesia lewat maknanya secara sarkas. Selain pengekan akan busana dan politik identitas kaum hawa, dapat diketahui bahwa sebetulnya zaman Orde Baru juga merenggut tubuh perempuan, yang di mana tubuh perempuan merupakan eksistensi perempuan itu sendiri (Susilo and Kodir 2016). Bahkan, sampai saat ini pun perempuan masih belum mempunyai hal yang harus didapatkannya, baik dari individu, norma atau kelompok.

SIMPULAN

Sejarah syair *Lautan Jilbab* mencerminkan mengerasnya agama di ruang publik akibat faktor-faktor seperti keterbukaan ruang publik pascareformasi. Di satu sisi, hal ini membawa angin segar bagi demokratisasi, namun di sisi lain, membuka peluang bagi perebutan ruang diskursus keagamaan yang tidak terkontrol. Kelompok-kelompok keagamaan yang sebelumnya terpinggirkan pada masa Orde Baru, tiba-tiba muncul dan mendominasi ruang publik, yang memicu kecurigaan dari pihak pemerintah. Kritik sosial-keagamaan yang terkandung dalam syair *Lautan Jilbab* berusaha menyuarakan kegaduhan politik Indonesia yang berdampak pada diskriminasi terhadap umat Muslim pada masa Orde Baru. Medium syair dan teater dipilih sebagai respons terhadap kekuatan represif militer di bawah pemerintahan Soeharto, yang pada saat itu menekan banyak aktivis 98. Syair *Lautan Jilbab* tidak hanya mengkritik diskriminasi terhadap busana, tetapi juga mengeksplorasi aspek ideologis, sosial, dan budaya, serta interaksi pergerakan perempuan Muslim Indonesia yang memperjuangkan kebebasan berpendapat.

Artikel ini menunjukkan hal-hal yang belum banyak dibahas dalam studi-studi sebelumnya dan merefleksikan bahwa problematika sosial-keagamaan dapat dianalisis melalui kajian sastra. Meski demikian, analisis dalam artikel ini terbatas pada kritik sosial-keagamaan dalam *Lautan Jilbab* karya Emha Ainun Nadjib. Ke depan, artikel ini dapat

diperluas dengan studi interdisipliner yang mencakup aspek antropologi, feminisme, ekologi, atau bahasa dan sastra Islam. Diharapkan, hasil temuan tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kritik sosial-keagamaan dalam sastra, serta memperkaya eksplorasi sosial-keagamaan, khususnya di bidang sastra.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Zukhrizal Irbhani S.S; Cahaya Daffa, S.S; Fajar Siddiq, S.S; Dr. Rahmatullah, M.Ag; Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal Sanggam, dan Komunitas Riau Sastra yang telah membantu mengkaji dan menerbitkan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adiatma, Rahman Cahaya. "Gagasan Kritis dan Perlawanan Emha Ainun Nadjib Terhadap," n.d.
- Akbar, Ahmad Zaini. "Kritik Sosial, Pers Dan Politik Indonesia." *UNISIA*, no. 32 (2016): 44–51.
- Argenti, Gili. "Kelompok Post Islamisme Pasca Revolusi Islam Iran 1979." *Jurnal Politikom Indonesiana* 3, no. 1 (2018): 139–139.
- Argenti, Giri, and Maulana Rifai. "Islam Politik Era Refomasi Pergulatan Ideologi Partai Politik Islam Antara Formalis Dan Subtansi," 2014.
- Arief, Muhammad Ihsanul, and Gt Muhammad Irhamna Husin. "Agama Dan Sistem Pendidikan Nasional (Kasus Pelarangan Jilbab Di Sekolah)." *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 2019, 171–90.
- Azra, Azyumardi. "Kesalehan Dan Politik: Islam Indonesia." *Studia Islamika* 25, no. 3 (2018): 639–50.
- Creswell, John W, and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Amerika Serikat: Sage Publications, 2014.
- "Emha Ainun Nadjib," n.d. <https://tirto.id/m/emha-ainun-nadjib-x5>.
- Faiz, Abd Aziz. "Emha Ainun Nadjib dan Teologi Harmoni Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Agama." *Jurnal Sosiologi Agama* 13, no. 2 (2019): 1–24.
- Ghazali, Adeng Muchtar. "Toleransi Beragama Dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 1, no. 1 (2016): 25–40.
- Hadi, Sumasno. *Humanisme Teistik Emha Ainun Nadjib Dan Kontribusinya Bagi Kehidupan Sosial*. Gadjah Mada University, 2017.
- Hanafi, Abdul. "Pemikiran Tasawuf Menurut Emha Ainun Nadjib." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2019.
- Husyein, Syarieff. "Antropologi Jilboob: Politik Identitas, Life Style, Dan Syari'ah." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 4, no. 2 (2017).
- Iqbal, Muh. "Wajah Baru Pendidikan Islam Indonesia: Jilbab, Toleransi, Dan SKB 3 Menteri." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 13, no. 2 (2021): 201–18.
- Kamsi, Kamsi. "Citra Gerakan Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Bangsa Indonesia (Studi Era PRA Kemerdekan Sampai Dengan Era Orde Baru)." *Millah: Jurnal Studi Agama* 13, no. 1 (2013): 109–54.
- Khulafa, Luthfi Arrsoyid. "Pesan Dakwah Dalam Buku Puisi Syair Lautan Jilbab Karya Emha Ainun Nadjib (Kajian Hermeneutika Paul Ricoeur)." PhD Thesis, UIN Prof Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2021.

- MADUNG, Otto Gusti Ndegong. *Post-Sekularisme, Toleransi Dan Demokrasi*. Penerbit Ledalero, 2017.
- Ma'ruf, Mudzakkir. "Konsepsi Emha Ainun Nadjib Tentang Relasi Islam Dan Budaya Dalam Perspektif Filsafat Budaya." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Muniroh, Shofiyatul. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Antologi Puisi Lautan Jilbab Karya Emha Ainun Nadjib." PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2013.
- Nadjib, Emha Ainun. *Markesot Beltutur*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2012.
- . *Orang Maiyah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2016.
- . *Sedang Tuhan Pun Cemburu*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2015.
- . *Slilit Sang Kiyai*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- . *Syair Lautan Jilbab*. Jombang: Yayasan Al-Muhammady, 1989.
- Najib, Ainun. "Pementasan Drama Lautan Jilbab Karya Emha Ainun Nadjib Dalam Fenomena Pelarangan Menggunakan Jilbab Bagi Pelajar Muslimah Di Sekolah-Sekolah Negeri Di Indonesia (1986-1989 M)." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Najitama, Fikria. "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrûr." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 1 (2014): 9–18.
- Naquib Al-Attas, Syed Muhammad. *Risalah Untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: Institut Antarbangsa Pemikiran dan Tamadun Islam, 2001.
- Nuraeni, Leni, Leni Nuraeni, and Setia Gumilar. "Pelarangan dan Perjuangan: Pemakaian Jilbab Pelajar Putri Pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991." *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 18, no. 2 (2021): 163–75.
- Pohan, Muslim. "Politik Seksual Terhadap Organisasi Perempuan Pasca Kemerdekaan Di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 1 (2020): 22–30.
- Pratiwi, Debby Alya, Indah Safitri, and Lilatul Farika. "Kritik Sosial Dalam Kumpulan Puisi Ws Rendra: Kehidupan Masyarakat Di Indonesia." *Cakrawala Linguista* 1, no. 2 (2019): 59–67.
- Ramadhan, Home Berita Kajian Artikel Kolom. "Perjuangan Jilbab Di Sekolah-Sekolah Negeri Di Indonesia Pada Tahun 1980-An," n.d.
- Rana, Junaid. "The Story of Islamophobia." *Souls* 9, no. 2 (2007): 148–61.
- Riyanti, Ikrimah Vella. "Rekam Jejak Emha Ainun Nadjib Dalam Perkembang Politik Indonesia (1991-2013)." PhD Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.
- Royanto, Dwi. "Analisis Kumpulan Puisi Lautan Jilbab Karya Emha Ainun Nadjib Dalam Perspektif Psikologi Islami." PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2011.
- S Nugraha, Latief. "Secuil dari Sepotong Dunia Emha." *Caknun.com* (blog), March 24, 2018. <https://www.caknun.com/2018/secuil-dari-sepotong-dunia-emha/>.
- Shukri, Syaza Farhana Mohamad. "The Perception of Indonesian Youths toward Islamophobia: An Exploratory Study." *Islamophobia Studies Journal*, 2019.
- Sofyan, M. Ali. "Islam Dan Marginalisasi Perempuan: Kuasa Perempuan Di Balik Prostitusi Warung Pantura." *Kodifikasi* 13, no. 2 (2019): 283–98.
- Subarkah, Muhammad. "Celana Jengki, Agotukung, Jilbab, Cadar: Razia Radikalisme?," November 1, 2019. <https://www.republika.co.id/berita/q08lfv385/celana-cingkrang-jenggot-jilbab-cadar-razia-radikalisme-part1>.
- Suhendra, Ahmad. "Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab Dan Abstrak Jilbab Dalam Al Qur'an." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 6, no. 1 (2016): 1–22.
- Suryan, Suryan. "Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam." *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 2 (2017): 185–200.

- Susilo, Daniel, and Abdul Kodir. "Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, Dan Perlawanan." *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2016): 317–30.
- Syarat, Untuk Memenuhi Salah Satu, and Muh Ainun Najib. "Pemikiran Emha Ainun Nadjib Terhadap Isu-isu Politik Kebangsaan Aktual di Indonesia," n.d.
- Wulansari, Anindya Dessi. "Di Mana Perempuan Indonesia Menemukan Arti 'Merdeka?': Sejarah Yang Berulang Dan Upaya Penyelesaian," n.d.
- Yulikhah, Safitri. "Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial." *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, no. 1 (2017): 96–117.
- Yunus, A. Faiz, and Muhammad Luthfi. "Sufism Practices at Ma'iyahan Emha Ainun Nadjib," 2019.